

# PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI POLA AGRIBISNIS MENUJU KETANGGUHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh : Purbayu Budi Santosa

## ABSTRACT

*Economic and financial crisis in 1988 should become a turning point or momentum for Indonesia to push its agricultural sector. Based on the fact that the majority of the people in the country still live on agriculture and its related activities, various innovation in this sector should be strived to overcome the crisis impacts that hit almost every sector. Agriculture could become a life saver for many people. Therefore, the development of agribusiness should be seriously implemented as an economic defense for the sake of the country's economic development. Agribusiness with its many patterns has a great potency to create a tough Indonesian economical development. It needs a strong political will from the government as the key role to achieve the development goals. There are many strategies that could be used for it, such as human resource development, financial aid program, partnership program, and commodity mapping, based on regional assessment.*

**Keywords:** *Agribusiness, Economic defense, Indonesian Economical Development*

## A. PENDAHULUAN

Sampai dewasa ini corak perekonomian Indonesia sebenarnya masih didominasi oleh sektor pertanian (agraris). Kalau pada masa penjajahan dan era pemerintahan Soekarno pangsa sektor pertanian sangat menonjol baik dalam komposisi sumbangannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor, maka pada dewasa ini peranan sektor pertanian paling menonjol dalam penyerapan tenaga kerja.

Meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia,

tetapi tidak demikian dengan nasib kebanyakan petani yang masih terkungkung dalam kubang kemiskinan, kekumuhan, dan keterbelakangan. Beberapa pakar berpendapat terhadap keberadaan petani yang memelas tersebut diantaranya Bceke (1910) berpendapat karena dualisme sosial (*social dualism*), Geertz (1973) berpendapat karena adanya pemungkretan pertanian (*agricultural involution*) berdasarkan tingkah pembagian kemiskinan (*shared poverty*) dan oleh Penny (1976) dikarenakan sifat khas petani yang terpana kebutuhan subsisten (*peasants subsistence mindedness*). Bahkan menurut Soetomo

(1997) manusia petani selalu kalah baik berhadapan dengan alam, sistem kekuasaan dan politik, serta dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkiblat kepada krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia ditambah lagi krisis politik dan kepercayaan, ternyata sektor pertanian yang mendapat sebutan *backwardness* tersebut merupakan sektor yang cukup tahan terhadap deraan krisis dan dapat sebagai katup pengaman keberadaan perekonomian Indonesia. Jika dilihat kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang -13,66%, maka sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar pada sektor bangunan (-35,44%), perdagangan, hotel, dan restoran (-1,42%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-18,58%) dan sektor industri (-12,00%), sedangkan sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif (+0,26%). Sumbangan sektor pertanian dalam PDB pada tahun 1998 sebesar 18,04%, yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1996 (16,53%) dan 1997 (16,07%). Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari BPS selama 1999 mengalami pertumbuhan 0,23%, di mana pertumbuhan terbesar terjadi pada listrik, gas, air bersih (7,25%), sedangkan sektor jasa dan pertanian juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar

2,82% dan 0,67%. Beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan yang negatif diantaranya sektor pertambangan dan penggalian (-0,11%) dan perdagangan, perhotelan, dan restoran (-1,1%), angkutan dan komunikasi (-0,72) dan keuangan (-8,67%). Kontribusi terbesar bagi PDB tahun 1999 berasal dari sektor industri (25,78%), pertanian (19,41%) dan perdagangan (16,51%) (Kontan, Nomor 21, Tahun IV, 21 Februari, 2000). Perhatikan Lampiran I yang menampilkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 disertai sumbangan masing-masing sektor ekonomi.

Meskipun pertumbuhan pada sektor pertanian untuk tahun 1998 hanya kecil saja dan bernilai positif, sementara untuk tahun 1999 berbagai sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi pembangunan pertanian merupakan makna yang penting untuk menuju kepada perekonomian Indonesia yang kokoh, yaitu perekonomian yang mempunyai fundamental yang kuat, di mana pembangunan terutama banyak memakai sumber daya yang dimiliki sendiri, banyak menyerap tenaga kerja, dapat mendayagunakan usaha kecil dan menengah, serta dapat berkompetisi dalam pemasaran. Pencapaian usaha tersebut harus terarah kepada pembangunan pertanian berpola kepada agribisnis, yang akan dapat menghilangkan keterbelakangan sektor pertanian (primer) dan dapat menghilangkan posisi pertanian yang

masa lalu hanya diposisikan sebagai “pendukung” sektor lain bukan sebagai “mesin penggerak” pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai sektor pendukung maka sektor pertanian diposisikan sebagai : 1) Pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri murah; 2) Pengendali stabilisasi harga; dan 3) Pemasok tenaga kerja murah (Soleh Solahuddin, 1998). Hal ini berarti strategi pembangunan tidak mengambil titik tumpu kepada sektor pertanian, melainkan kepada sektor lain yang menyebabkan tidak mantapnya perekonomian nasional. Sebelum kita bicarakan bagaimana cara mengembangkan sektor pertanian yang maju (agribisnis), perlu dilakukan kilas balik bagaimana strategi pembangunan di jaman orde baru yang menghasilkan ketidakmantapan dan fundamen (pondasi) perekonomian Indonesia, sehingga mudah terkena badai krisis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kesalahan Pembangunan Ekonomi dalam Masa Orde Baru**

Pembangunan ekonomi selama rejim Presiden Soeharto secara jujur ditilik dari aspek fisik sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi dari aspek fundamental perekonomian menghasilkan pondasi yang sangat rapuh : strategi pembangunan dalam masa itu bertumpu kepada Trilogi Pembangunan, masing-masing pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Titik

berat dari masing-masing tahapan pembangunan dapat berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi menurut kepentingan petinggi pengambil kebijakan. Secara konsepsional strategi seperti ini sangatlah baik, tetapi dalam implementasinya banyaklah terjadi kemencengan. Kalau yang dilihat terciptanya stabilitas nasional memang benar terjadi pada masa Orde Baru, tetapi sifatnya semu, yang berarti sebenarnya kita semua dibuat untuk merasa takut dan tunduk kepada pemerintah petinggi negara. Karena kita sudah sangat terkekang cukup lama, maka begitu sedikit ada peluang untuk bertindak lain (keran kebebasan), maka akibatnya muncullah *euphoria anarkisme*.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa itu rata-rata cukup tinggi (6-8%), tetapi apakah disertai dengan pemerataan pendapatan? Memang kalau secara agregat dalam masa-masa tertentu terjadi ke arah pemerataan pendapatan, tetapi secara mikro ataupun sektoral berjumlah mesti terjadi. Sebagai misal dalam bidang pertanian ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan lahan pertanian pada berbagai daerah cukuplah tajam (angka Gini/AG lebih besar 0,5), sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pendapatan. Penelitian penulis (1997) di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan pemilikan lahan pada musim kemarau dan penghujan cukup timpang (AG masing-masing 0,587 dan 0,586) sedangkan

penguasaan lahan mengalami penurunan dalam ketimpangan masing-masing AG-nya 0,452 (musim kemarau) dan 0,449 (musim penghujan).

Penelitian Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tahun 1993 menyebutkan bahwa hanya 3 juta penduduk Indonesia berpendapatan sebesar rata-rata US\$ 20.000 per kapita per tahun. Sementara 20 juta penduduk lainnya berpendapatan rata-rata US\$1.500 per kapita per tahun, kemudian masih ada 140 juta penduduk dengan rata-rata pendapatan US\$ 380 per kapita per tahunnya dan terakhir 27 juta penduduk lagi masih berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita pertahunnya hanya US\$190 saja. Jika dilihat dalam penguasaan asset nasional, maka 80 persen perekonomian Indonesia hanya dinikmati oleh sekitar 200 gelintir konglomerat, sementara yang 20% harus dibagikan oleh 200 juta penduduk Indonesia lainnya (Abdoel Sjoekoer, 1998).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup besar tersebut dapat terjadi karena modal berasal dari dalam negeri dan luar negeri (salah satunya dari hutang luar negeri). Pertumbuhan untuk sektor industri cukuplah besar, di mana untuk tahun 1990 sebesar 11,2 %, tahun 1991 sampai tahun 1993 antara 9,5-9,7% per tahun dan tahun 1994 dan 1995 sama besar 12,0%. Untuk sektor pertanian pertumbuhan untuk tahun

1990 dan 1994 sama-sama sebesar 2,7% per tahun, demikian juga untuk tahun 1991 dan 1993 juga sama besar yaitu 1,4 % per tahun dan pada tahun 1995 sebesar 3,0% per tahun. Perhatikan Lampiran 2 yang melukiskan berbagai indikator ekonomi Indonesia, termasuk data mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor. Menurut Soeharsono Sagir (1997) rendahnya pertumbuhan sektor pertanian tentunya berkaitan dengan rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian. Alokasi kredit untuk sektor pertanian pada tahun 1990 (8,4%), 1991 (7,65%), 1992 (7,69%), 1993 (8,16%), 1994 (8,90%), dan 1995 (7,31%); sedang di lain pihak sektor industri memperoleh alokasi kredit pada tahun 1990 (31,7%), 1991 (31,4%), 1992 (30,6%), 1993 (35,0%), 1994 (33,5%), dan 1995 (31,6%).

Pertumbuhan sektoral yang tinggi pada sektor industri ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja secara berarti, karena tenaga kerja kebanyakan masih berada di sektor pertanian. Dengan demikian sektor industri yang dikembangkan bersifat padat modal, sehingga tesis Lewis dan Ranis-Fei tidaklah cocok dan tepat diterapkan di Indonesia. Menurut Bungaran Saragih (1998) industri yang diadopsi di Indonesia adalah kombinasi dari pengembangan industri-industri yang ber-spektrum luas (*broad based industry*), yaitu strategi yang lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (*footlose*

*industry*) yang bersumber dari relokasi industri dan perluasan pasar industri negara lain (seperti industri elektronik, tekstil, otomotif, dan lain-lain) dengan industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, persenjataan, kapal, dan industri lainnya.

Industri yang diterapkan di Indonesia kebanyakan masih manja meminta perlindungan dari pemerintah (tentunya dengan balas jasa tertentu), sehingga pasar dalam negeri dapat dikuasai dan secara umum tidak mampu untuk ekspansi ke luar negeri. Kenyataan ini menurut Saragih (1998) didukung oleh kebijakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (kurs rupiah) dibuat *artificial overvalued Exchange rate*. Kebijakan kurs yang demikian mensubsidi kurs untuk impor dan sekaligus menerapkan pajak kurs pada ekspor, sehingga memberi insentif bagi industri yang berbahan impor. Sehingga yang terjadi para industriawan besar (konglomerat) diuntungkan dengan bahan baku yang diimpor lebih murah dari yang semestinya dan penjualannya kebanyakan untuk pasar dalam negeri, di mana terdapat 200-an juta konsumen. Belum lagi modalnya banyak diperoleh dari kredit murah, tetapi karena keserakahannya banyak yang terjebak karena hutang luar negeri. Orang umum juga tahu bahwa yang menguasai industri hanya beberapa orang konglomerat di mana orang tersebut kebanyakan

warga keturunan maupun pihak-pihak yang dekat petinggi negara. Budaya NKK (penulis lebih senang menyebut istilah ini), karena KKN sebenarnya sebuah istilah yang sangat tepat untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan tugas luhur dari mahasiswa untuk mengerti dan membantu masyarakat desa. Kenapa sebutan untuk istilah luhur diterapkan untuk istilah yang kurang baik. Sebaliknya NKK sebelumnya merupakan singkatan dari Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang merupakan suatu langkah untuk memberangus kehidupan mahasiswa. Istilah NKK juga lebih tepat, karena dari nepotisme biasanya menimbulkan kolusi dan akhirnya kepada korupsi. Ternyata telah menyebabkan biaya ekonomi tinggi, yang sebenarnya menggambarkan lemahnya pondamen perekonomian dan tidak efisiensinya perekonomian nasional.

## **2. Perubahan dalam Pola Pembangunan**

Strategi pembangunan yang dicanangkan pada rejim Soeharto sebenarnya terlalu meniru pola pembangunan negara-negara maju (industri), yaitu ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana strategi industrialisasi dikedepankan dan melalui mekanisme *trickle down effect* akan membawa kenaikan pendapatan pada masyarakat lapisan bawah. Dengan kata lain untuk mengejar ketinggalan dari negara maju maka lompatan nilai

tambah pendapatan perlulah segera diraih, akan tetapi karena kurangnya pembangunan kelembagaan (institusional) yang benar justru pada ujungnya berakibat pada bencana krisis. Melihat ketidak berhasilan strategi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang berbasis impor, padat modal, berteknologi tinggi dan penuh nuansa kolusi dan korupsi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap strategi pembangunan.

Untuk merealisasikan hal ini tentunya kita harus melihat kepada sebutan negara kita sejak dahulu disebut negara agraris, maka titik tolak pembangunan harus bertumpu kepada pertanian. Pertanian yang diinginkan tentunya pertanian yang kokoh, yang unggul, yang mempunyai tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi, dan kompetitif dalam pemasaran. Untuk menghasilkan hal ini tentunya memerlukan penyediaan sarana produksi yang memadai disertai pengolahan hasil-hasil pertanian, sehingga pemasarannya menjadi lancar. Dengan kata lain perlulah diwujudkan strategi pembangunan agribisnis yang terdiri dari sub-sektor penyediaan input, sub-sektor produksi dan sub-sektor output di mana pembangunan pada masing-masing sub-sektor produksi terkait dan terintegrasi. Menurut Saragih (1998) sektor agribisnis, terdiri dari pertama sub-sektor agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi

(industri, perdagangan) yang menghasilkan sarana produksi (input) bagi pertanian primer, kedua sub-sektor pertanian primer (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan usaha tani yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan produk pertanian primer (sehingga disebut pertanian primer); dan ketiga sub-sektor agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan (industri hasil pertanian/agro-industri) beserta perdagangannya. Adapun menurut Fachrurrozie Sjarkowi (1992) agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian; yaitu meliputi usaha (produksi dan pemasaran input-pertanian), (usaha tani), serta (usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Atau secara singkatnya menurut Dumairy (1992), pembangunan pola agribisnis meliputi pembangunan agronomi, agro-industri, serta pembangunan agromi niaga.

Penerapan strategi pembangunan pada agribisnis sangatlah tepat mengingat dalam kancah global ternyata agribisnis merupakan industri dunia terbesar (Peter Batt dalam Beddu A, 1997) dan bagi Indonesia juga merupakan mega sektor dalam perekonomian nasional, yaitu melibatkan seluruh wilayah nasional, menyerap sekitar 70 persen angkatan kerja nasional, melibatkan 90 persen usaha kecil-menengah dan koperasi dan meng-

hidupi (sumber) pendapatan hampir 80 persen penduduk Indonesia yang pada saat ini berjumlah sekitar 202 juta jiwa (Saragih, 1998). Menurut Soekartawi (1991) agribisnis berprospek cukup cerah di Indonesia karena : a) Letak Indonesia di garis khatulistiwa yang menyebabkan cukupnya sinar matahari; b) Lokasi Indonesia berada di luar zone angin taifun; c) Kecukupan sarana dan prasarannya; dan d) Sektor pertanian sebagai sektor yang mendapatkan prioritas penting. Meskipun begitu menurut Perhepi (1989 dalam Soekartawi, 1991) hambatan dalam pengembangan agribisnis meliputi berbagai hal, diantaranya : a) Lokasi produksi yang terpencar-pencar; b) Sarana dan prasarana khususnya di luar Jawa masih belum memadai; c) Akibat; d) Menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi; e) Sering dijumpai adanya pemusatan agroindustri yang terpusat di kota-kota besar, sehingga bahan baku pertanian menjadi mahal untuk mencapai lokasi agribisnis tersebut; dan f) Sistem kelembagaan di pedesaan masih lemah.

### **3. Berbagai Langkah Strategis dalam Pengembangan Agribisnis**

Seperti telah dikemukakan agribisnis sebenarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, masing-masing penyediaan sarana produksi, proses produksi/menghasilkan produk pertanian, pengolahan hasil, dan

pemasaran hasil. Pengembangan agribisnis sebagai upaya untuk memajukan pertanian yang modern menuju kepada ketangguhan perekonomian Indonesia, memerlukan kemauan politis (*political will*) dari pemerintah untuk mengerahkan segala sumberdaya dan sumberdana yang dapat dimiliki untuk mengembangkan keempat komponen (subsistem) tersebut. Langkah-langkah strategi secara garis besar yang perlu dilakukan oleh diantaranya :

#### **a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Agribisnis**

Kondisi sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang pertanian sungguh sangat memprihatinkan. Didin S. Damanhuri (1999) dengan mengutip hasil Sensus Pertanian 1993, menyimpulkan pertama sekitar 88 persen petani Indonesia hanya memperoleh pendidikan maksimum tamat SD, bahkan sekitar 15% diantaranya tidak sekolah. Kedua, dengan tingkat pendidikan mayoritas petani yang sangat rendah tersebut mengakibatkan produktivitas SDM yang juga rendah, khususnya dalam menyerap berbagai teknologi, yakni hanya sekitar 0,23%; 0,36%; dan 0,39% dibandingkan produktivitas SDM di sektor industri, perdagangan, dan rata-rata nasional. Ketiga, kondisi kedua tersebut antara lain disebabkan oleh terdapatnya kecenderungan semakin membengkaknya jumlah petani gurem (pemilik lahan kurang

dari 0,5 hektar), yakni dari sekitar 9,5 juta (1983) menjadi sekitar 11 juta orang (1993). Melihat kepada masih rendahnya kondisi SDM tersebut maka diperlukan berbagai usaha keras untuk menaikkan kualitas SDM yang bergerak dalam bidang agribisnis. Usaha ini dapat dilakukan oleh para penyuluh pertanian dan harus dirubah orientasinya, yang tidak seperti dahulu-dahulu hanya berorientasi kepada alih teknologi peningkatan produksi. Orientasi penyuluhan haruslah menyeluruh dan terpadu serta berjalan serasi yang menyangkut semua aspek agribisnis, seperti aspek teknis, pemasaran, pembukuan, permodalan, asuransi, dan berbagai aspek lainnya. Kemudian dalam mengantisipasi perkembangan global, perlu dilakukan juga penerapan teknologi yang tepat, seperti penerapan bioteknologi, teknologi *ecofarming*, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi (Dillon, 1998). Akan lebih mengena apabila dapat dilakukan kerjasama secara terkoordinasi antara dinas terkait di dalam melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian Tim Lemlit Undip (1999) dalam menemukan komoditas unggulan pertanian di Jawa Tengah, koordinasi antar dinas terkait masih dan berbagai pembinaan masih dirasa kurang oleh para pengusaha/petani. Pihak Perguruan Tinggi dan LSM yang tertarik untuk mengadakan pembinaan dalam rangka ikut membangun agribisnis yang tangguh sangatlah diharapkan;

dan untuk kelancaran tugasnya perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan pembinaan.

#### **b. Bantuan Dana Keuangan**

Sembuhnya perekonomian nasional dari penyakit yang kronis memang memerlukan obat yang mujarab. Paduan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat disertai terjaminnya keamanan, tentunya merupakan obat yang dipandang cukup manjur. Sekarang ini di mana gejala inflasi mulai mereda, kiranya dapat diambil kebijaksanaan untuk menurunkan suku bunga, supaya sektor riil dapat menggeliat dari kegerahan. Langkah yang perlu diambil untuk mencapai kepada ketangguhan perekonomian Indonesia adalah dengan merealisasikan pembangunan agribisnis, di mana pembangunan kepada sub-sektor sub-sektor yang saling terkait dan terintegrasi baik sektor input, produksi, dan output. Bantuan dana demikian diperlukan untuk menggalakan pengembangan agribisnis di negara kita, di mana diarahkan kepada penggunaan sumber daya (bahan baku) dari dalam negeri. Para pengusaha yang bergerak dalam bidang agribisnis terkadang kesulitan untuk akses ke dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, maka diperlukan persyaratan yang mudah dan tidak berbelit untuk pinjam uang. Dengan adanya berbagai persyaratan yang mudah dan tidak berbelit untuk pinjam uang.



Dengan adanya berbagai macam bantuan skim kredit untuk mengembangkan sektor pertanian, dapatlah menolong kepada pengusaha yang menggeluti sektor agribisnis. Lihatlah dalam lampiran untuk melihat berbagai jenis skim kredit yang sekarang diadakan pemerintah, yang tentunya dengan tingkat bunga rendah. Iklim penanaman modal baik PMA maupun PMDN dalam bidang agribisnis perlu diberikan berbagai kemudahan. Rangkuti (1992) menyebutkan perlunya diambil berbagai kebijaksanaan dalam bidang pembiayaan untuk mengembangkan agribisnis, diantaranya :

- 1) Penyediaan dana pengembangan agribisnis melalui pungutan dalam transaksi perdagangan komoditi pertanian baik domestik maupun melalui ekspor yang peruntukkan dan cara penggunaannya ditetapkan pemerintah secara khusus seperti dana reboisasi di kehutanan;
- 2) Penyediaan anggaran pembangunan melalui APBN yang diperlukan dalam jumlah yang memadai untuk kegiatan pengembangan agribisnis;
- 3) Pengembangan bank agribisnis dengan persyaratan dan cara kerja khusus yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan sitem kredit program khusus yang ditetapkan Pemerintah.

### **c. Pola Kemitraan**

Pola kemitraan antara para petani/pengusaha dengan pengu-

saha menengah dan besar atau pihak lainnya sangatlah diharapkan. Pola kemitraan ini hendaknya dapat saling menguntungkan kepada pihak-pihak yang terkait, dan jangan dilaksanakan karena hanya untuk memenuhi himbauan, yang ternyata sering-sering setengah hati atau justru pihak petani palahan dirugikan. Hasil penelitian Akatiga (1996) kiranya dapat memberikan contoh di mana pola kemitraan justru merugikan pihak petani. Penelitian yang diadakan pada PIR pangan (nanas) di daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa penyebab kegagalan pada pihak perusahaan inti diketemukan, seperti kegagalan mendelegasikan proses produksi primer kepada petani plasma, memasok dana, teknologi, dan penyuluhan yang dijanjikan. Petani yang akhirnya tidak dapat menghasilkan buah nanas yang berkuaitas, dan tidak dapat menjual hasil-hasil usaha taninya secara terus-menerus/teratur. Akibatnya petani harus menanggung beban dan mengalami kerugian. Peran koperasi juga sangatlah diperlukan dalam rangka mengembangkan ketahanan sektor pertanian. Koperasi yang diadakan benar-benar menguntungkan para anggotanya, di mana dengan koperasi yang ada dapat dibeli berbagai sarana produksi, menjual hasil produksi, dan pinjam dana untuk pengembangan usaha tani. Pengalaman koperasi masa lalu yang kebanyakan hanya menguntungkan para pengurusnya perlulah dibuang jauh-jauh. Koperasi

juga sebagai memperkuat posisi petani (*bargaining position*) dalam menjual hasil produk pertaniannya ke pihak lainnya (misal pedagang pengumpul). Dengan demikian ide, visi, dan misi koperasi yang sebenarnya perlu direalisasikan sekarang ini.

#### **d. Perwilayahan Komoditis**

Pengembangan agribisnis tentunya harus berorientasi kepada penciptaan keuntungan yang layak, sehingga memerlukan skala usaha yang ekonomis. Dalam kaitan pencapaian hal ini rangkaian kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran produk komoditi olahan menuntut skala tertentu untuk dapat hidup dan berkembang secara ekonomis. Skala ekonomis untuk kedua rangkaian agribisnis ini tentunya harus didukung oleh skala usaha produksi bahan mentah yang bersangkutan. Tentunya untuk berbagai jenis komoditi pertanian skala ekonomi dalam pengusahaannya melalui sistem agribisnis tidak sama. Salah satu kendala utama pengembangan agribisnis berbagai komoditi pertanian selama ini adalah tidak tersedianya persediaan bahan mentah yang memadai dari segi jenis, mutu, dan jangka waktunya untuk dapat mendukung industri pengolahan bahan mentah bersangkutan secara ekonomis. Melihat lahan pertanian sekarang ini sudah banyak terpecah-pecah menjadi lahan yang kecil-kecil, maka untuk mencapai skala ekonomis diperlukan konsolidasi usaha tani. Mengingat

berbagai hal tersebut, maka kebijaksanaan perwilayahan komoditas perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan agribisnis satu atau lebih komoditas pertanian di suatu kawasan tertentu. Rangkuti (1992) berpendapat penentuan satu kawasan perwilayahan komoditas ini seharusnya berdasarkan penelitian dan pengkajian yang cermat antara lain dari segi :

- 1) Kesesuaian daya dukung sumber daya alam (Kondisi tanah secara keseluruhan, sumber air, dan iklim) untuk komoditi pertanian bersangkutan;
- 2) Potensi sumber daya manusia baik dari jumlah maupun kualitasnya yang ada dan perlu dikembangkan;
- 3) Potensi sumber daya buatan yang ada dan yang dapat dikembangkan.

#### **C. PENUTUP**

Dalam bagian penutup akan ditarik beberapa kesimpulan dari penelaahan di atas, yaitu :

1. Krisis moneter dan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun drastis. Dengan adanya berbagai krisis tersebut, menandakan pentingnya sektor pertanian di mana sektor tersebut cukup tahan terhadap badai krisis, yang ditandai pada tahun 1998 hanya sektor pertanian yang mempunyai pertumbuhan nilai positif, sementara sektor ekonomi lainnya mengalami

- pertumbuhan negatif secara menyeluruh mengalami pertumbuhan minus 13,66%;
2. Strategi pembangunan yang bertumpu kepada industri dengan teknologi tinggi, padat modal, dan berbahan baku impor, ditambah lagi dikuasai para konglomerat yang mengandalkan fasilitas dan perlindungan dari pemerintah (budaya NKK), menyebabkan berbagai ketimpangan, ketidakadilan, ketidakefisienan dan lemahnya pondasi perekonomian nasional;
  3. Untuk mengantisipasi masa krisis dan bervisi ke depan, dikembangkan pembangunan pertanian dengan pola agribisnis yang masing-masing terdiri dari sub sistem penyediaan sarana produksi, proses produksi/ menghasilkan produk pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil. Sistem pembangunan agribisnis sangat tepat untuk direalisasikan dalam rangka menuju kepada ketangguhan perekonomian Indonesia, di mana perlu diambil langkah pemberdayaan sumber daya manusia agribisnis, bantuan kredit, diciptakan pola kemitraan, direalisasikan koperasi agribisnis diaktifkannya Litbang agribisnis, dan berbagai kebijaksanaan kebijaksanaan lainnya yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amang, Beddu. 1997. "Agroindustri dalam Era Industrialisasi dan Globalisasi". *Prakarsa*, Mei.
- BS, Purbayu. 1997. "Produktivitas Lahan dan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Status Penguasaan Lahan dan Usaha tani Padi (Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah)". Bandung : Unpad.
- Damahhuri, Didin S. 1999. *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik*. Jakarta: CIDES
- Dillon, HS. 1998. "Strategi Pengembangan Pasar Agribisnis". *Usahawan*. No. 10/Th XXVII, Oktober 1998.
- Ermawati Chotim, Erna. 1996. *Disharmoni Inti-Plasma dalam Pola PIR*. Bandung : Akatiga.
- Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lemlit UNDIP dan BI Semarang. 1999. "Identifikasi dan Pengembangan Komoditi Unggulan Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah", Semarang : Lemlit Undip dan Pengelolaan di Tingkat Makro dan Mikro. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Rangkuti, A.R. 1992. "Kebijaksanaan Strategis Pengembangan Agrobisnis", Paper Seminar Nasional Perhimpunan Ekonomi Indonesia (PERHEPI), di Hotel Horison,

Jakarta, Tanggal 24-25 Oktober 1992.

Saragih, Bungaran. 1998. "Strategi Pengembangan Pertanian Pasca Orde Baru". *Usahawan*. No. 10/Th XXVII, Oktober 1998

Sagir, Soeharsono. 1997. "Kesiapan Agro Industri Indonesia Menjelang Era Perdagangan Bebas". *Prakarsa*. Mei 1997

Soekartawi. 1991. *Agrobisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.

Soetomo, Greg. 1997. *Kekalahan Manusia Petani Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta : Kanisius.

Solahudin, Soleh. 1998. "Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Orde Baru". *Usahawan*. No. 10/Th XXVII, Oktober 1998.

Sjoekoer, Abdoel. 1998. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta : Pustaka Grafiksi.

Sjarkowi, Fachrurrozie. 1992. *Argribisnis Kiat Perencanaan dan Pengelolaan di Tingkat Makro dan Mikro*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Wahono, Francis. 1999. "Revolusi Hijau : Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi". *Wacana*, 1 Edisi 4, Tahun I, 1999.